



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
12. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
13. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
14. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
16. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna yang berhak.
20. Penentu Kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan kedinasan keluar dan ke dalam instansi seperti pimpinan tertinggi Eselon II atau Eselon III pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.

21. Pelaksana Kebijakan adalah Pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat Eselon III dan IV seperti Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
22. Pengawas adalah Pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan seperti Inspektur/Auditor pada Inspektorat, pengawas Intern pada Satuan Pengawas Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
23. Aparat Penegak Hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
24. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
25. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
26. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
27. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memotivasi Perangkat Daerah agar memberkaskan arsip dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis di Pemerintah Daerah;
  - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman.
  - c. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
  - d. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. asas dan pengorganisasian; dan

- b. pengamanan arsip dinamis.

## BAB II ASAS DAN PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu asas sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan standar operasional prosedur, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### Bagian Kedua Pengorganisasian

#### Pasal 5

Pengorganisasian Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

### Bagian Kesatu Sarana

#### Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing kabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

- d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

## Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

### Pasal 7

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggungjawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

### Pasal 8

Arsip dinamis yang tercipta dan termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Perangkat Daerah.

### Pasal 9

Arsip dinamis yang tercipta dan termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

### Pasal 10

Arsip dinamis yang tercipta dan yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum,

- b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan dan instalasi listrik/telepon;
- c. arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. arsip yang dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
- g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. arsip yang terkait dengan *memorandum of understanding*; dan
- i. daftar arsip rahasia.

#### Pasal 11

Pengamanan informasi arsip dinamis di Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

#### Pasal 12

Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

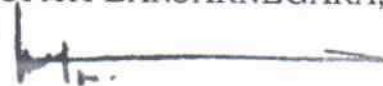
#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 4-5-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 4-5-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 41 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
UMUM						
	001	Lambang, meliputi : a. garuda; b. bendera kebangsaan; c. daerah; dan d. bandir/umbul-umbul.	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah. 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah.
	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non pns				
	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dan lain sebagainya); b. keagamaan; dan c. hari ulang tahun.				
	004	Ucapan, meliputi: a. terima kasih; b. selamat; c. mohon diri; d. bela sungkawa, dan lainnya;				
	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)				
	010	<p>Urusan dalam, meliputi:</p> <p>a. gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainage);</p> <p>b. rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun;</p> <p>c. peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dan lain-lain);</p> <p>d. pengurusan kendaraan dinas;</p> <p>e. keamanan/ketertiban kantor;</p> <p>f. perjanjian kerjasama <i>memorandum of understanding</i> (MoU) Pemda dengan instansi pemerintah atau swasta;</p> <p>g. laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kenegaraan dan hari-hari besar Keagamaan;</p> <p>h. kebersihan kantor;</p> <p>i. protokol (upacara bendera, tata tempat, pemasangan kepala negara/daerah, audensi, penerimaan tamu); dan</p> <p>j. kerjasama</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah.</p>
	020	<p>Barang dan Jasa, meliputi :</p> <p>a. penawaran (barang, jasa);</p> <p>b. penawaran barang (bergerak, tidak bergerak);</p> <p>c. pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang;</p>				<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>2. Bagian Umum Sekretariat</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Surat Perjanjian Kerja, kontrak/amandemen/addendum, teguran; e. Surat Perintah Mulai Kerja; f. serah terima pekerjaan g. pemeriksaan pekerjaan; h. perpanjangan waktu; i. denda; j. sanggahan; k. pemeliharaan barang/jasa; l. inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara; dan m.usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya				Daerah.
	030	Kekayaan Daerah, meliputi : a. barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak); b. barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dan lain-lain); c. barang persediaan dalam gudang; d. alat pengangkut (laut, darat, udara); e. peralatan pabrik, Laboratorium; f. peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan); g. usulan penambahan aset Daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak;	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah. 2. Bagian Umum Sekretariat Daeah. 3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya;</p> <p>i. penghapusan aset-aset barang milik Daerah;</p> <p>j. usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;</p>				
	030	<p>k. peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/ barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak; dan</p> <p>l. tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban aset-aset barang milik Daerah.</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usahapada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah.</p> <p>3. Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang keuangan</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan).	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kearsipan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan perpustakaan</li> <li>~ Pelestarian bahan perpustakaan</li> <li>~ Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam</li> <li>~ Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder</li> <li>~ Transliterasi, translasi</li> <li>~ Survey kondisi bahan perpustakaan</li> <li>~ Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kearsipan
	040	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Pengembangan bahan perpustakaan</li> <li>~ Pembinaan perpustakaan</li> <li>~ Pengembangan dan kerjasama perpustakaan</li> <li>~ Pembudayaan gemar membaca</li> <li>~ Penerapan, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan</li> <li>~ Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepustakawanan,</li> <li>~ Penilaian Angka Kredit Pustakawan</li> <li>~ Pemasarakatan bidang perpustakaan</li> </ul>	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang kearsipan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Pembinaan Dan pengembangan Kearsipan</li> <li>~ Bimbingan Teknis Kearsipan</li> <li>~ Pemantauan, supervisi danevaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik dan masyarakat</li> <li>~ Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip</li> <li>~ Pengembangan kelembagaan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan</li> <li>~ Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan</li> <li>~ Audit kearsipan, evaluasi dan Penilaian hasil pengawasan kearsipan</li> <li>~ Akuisisi arsip</li> <li>~ Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan</li> <li>~ Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip</li> <li>~ Penerimaan, Pemindehan dan penyerahan arsip</li> <li>~ Penelusuran dan wawancara secara lisan</li> <li>~ Penyelamatan arsip vital daerah</li> <li>~ Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip</li> </ul>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penyusunan indeks, guide, daftar dan inventaris arsip</li> <li>~ Transkripsi rekaman suara</li> <li>~ Penyusunan arsip citra daerah</li> <li>~ Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip</li> <li>~ Alih Media dan Reproduksi arsip statis</li> <li>~ Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan</li> <li>~ Restorasi dan registrasi arsip</li> <li>~ Autentikasi arsip statis</li> <li>~ Penelusuran sumber dan wisata arsip</li> <li>~ Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip</li> <li>~ Penyusunan tayangan naskah sumber arsip</li> <li>~ Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</li> <li>~ Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan</li> <li>~ Pameran, publikasi dan pemyarakatan kearsipan</li> </ul>				
	040	Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta pengamanannya aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah;</li> <li>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah.</li> </ol>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	040	SANDI 1. Pengamanan Persandian dan Informasi 2. Tata kelola persandian 3. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 5. Pengelolaan <i>security operation center</i>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	050	~ RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang ~ Renstra (Rencana Strategi) ~ RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), ~ RKP (Rencana Kerja Pembangunan) ~ RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) ~ Rencana Kerja Perangkat Daerah ~ KUA (Kebijakan Umum Anggaran) ~ KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) ~ Jawaban Bupati Atas Pandangan Fraksi ~ Nota Keuangan ~ RKT (Rencana Kerja Tahunan) ~ RKO (Rencana Kerja Operasional) ~ Laporan berkala	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perencanaan. 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		~ Lakip (Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah)				
	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN ~ Organisasi ~ Susunan Organisasi dan Tata Kerja ~ Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai ~ Organisasi Non Pemerintah ~ Organisasi semi pemerintah ~ Lembaga Non Struktural ~ Kelas Jabatan ~ Analisis Jabatan ~ Pengukuran/Penilaian beban kerjaJabatan ~ Sruktural dan Fungsional ~ Uraian Jabatan ~ Standar Kompetensi Teknis ~ Standar Kompetensi Manajerial ~ Ketatalaksanaan ~ Tata Naskah Dinas ~ Stempel dinas dan stempel jabatan, ~ Nama instansi pemerintah/non pemerintah, ~ Alamat-alamat kantor dan pejabat, ~ Ketentuan pakaian dinas dan atribut ~ Pola Hubungan Kerja, ~ Standar Operasional Prosedur ~ Hari dan Jam Kerja Pegawai ~ Indeks Kepuasan Masyarakat ~ Standard Pelayanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah. 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Inovasi Pelayanan</li> <li>~ Standard Prasarana Kerja Pegawai</li> <li>~ Akuntabilitas Kinerja</li> <li>~ Zona Integritas</li> <li>~ Reformasi Birokasi</li> <li>~ Budaya Kerja</li> </ul>				
	070	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penelitiandan PengembanganRisetmeliputiperizina nbagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset</li> <li>~ PengembanganKrenova(Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) dan SINAS (Sistem Informasi Nasional)</li> <li>~ Pameran Produk Inovasi/Ristek</li> <li>~ BTC (Bisnis Teknologi Center)</li> <li>~ Raptex (Penerapan Iptek )</li> <li>~ HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)</li> <li>~ Kajian</li> <li>~ Kajian Strategis/diskusi/focus group discussion</li> <li>~ Seminar, WorkshopSIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputicluster Kabupaten Desa dan Inkubator Teknologi dan Bisnis</li> <li>~ Kerjasama Penelitian</li> <li>~ Rapat Koordinasi/Rapat Teknis</li> <li>~ Lokakarya</li> <li>~ Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian</li> <li>~ Kerjasama Penelitian</li> <li>~ Instansi Pemerintah</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Kelitbangan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang perencanaan;</li> <li>2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.</li> </ol>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Perguruan Tinggi/Swasta</li> <li>~ Lembaga Swasta Nasional, LSM</li> <li>~ Lembaga International</li> <li>~ Perencanaan</li> <li>~ Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)</li> <li>~ Publikasi Ilmiah</li> <li>~ Jurnal Ilmiah</li> </ul>				
	080	<p>Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Bupati, Kepala Perangkat Daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja</p>	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usahapada masing-masing Perangkat Daerah</li> <li>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah</li> </ol>
		Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usahapada masing-masing Perangkat Daerah;</li> <li>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah.</li> </ol>
		Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	090	Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi: a. Bupati, Wakil Bupati; b. laporan perjalanan pegawai; c. SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah; d. laporan hasil peliputan kegiatan Kunjungan kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; 2. Bagian UmumSekretariat Daerah.
		e. laporan perencanaan kegiatan kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak panitia penyambutan, protokoler penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; 2. Bagian UmumSekretariat Daerah.
<b>II. KEPEGAWAIAN</b>						
	800	Kebijakan Kepegawaian, meliputi : a. perencanaan b. penelitian c. statistik	Biasa /Terbatas	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	810	Pengadaan Pegawai, meliputi : a. pendaftaran cpns (Testing, Screening, Pengumuman tes dan pemanggilan, Pengujian kesehatan, Pengangkatan cpns golongan I-III) b. pendaftaran tenaga kontrak kerja/Mitra Kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Umum, Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; 2. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah.
	820	Mutasi, meliputi : a. pengangkatan cpns b. pengangkatan pns golongan II-III	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah
	820	c. pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural eselon II-IV d. pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa /Terbatas	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	820	e. kenaikan gaji berkala golongan II-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	820	f. kenaikan pangkat golongan II-IV g. pemindahan/pelimpahan/pembantuan golongan II-IV h. lolos butuh i. data sering dan penempatan kembali j. wajib militer	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah
	830	Kedudukan, meliputi : a. peninjauan masa kerja	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah
		b. penyesuaian pangkat/gaji golongan II-IV	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah
		c. penghargaan ijasah (pencantuman gelar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi : a. tunjangan (struktural/fungsional) b. kehormatan c. tambahan penghasilan d. taspen, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. surat dispensasi	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	850	Cuti, meliputi : a. tahunan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan	Tidak memiliki dampak yang	1. Badan Kepegawaian Daerah;

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. besar c. sakit d. bersalin e. alasan penting f. di luar tanggungan negara		internal yang mempunyai hak akses	mengganggu kinerja Perangkat Daerah	2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	860	Penilaian, meliputi : a. penghargaan (satya lencana karya satya, kenaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	860	b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	860	c. konduite/DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	860	d. ujian dinas tingkat I dan III	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	860	e. penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	860	f. rehabilitasi	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah
	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. formasi pegawai; b. bezetting/daftar urut kepegawaian; c. Daftar Urut Kepangkatan Non Pegawai Negeri Sipil tidak tetap/ Badan Layanan Umum Daerah; dan d. sistem informasi kepegawaian (Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai, tanda pengenal, daftar keluarga, Kartu Suami/Kartu Isteri, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	870	f. Korps Pegawai Republik Indonesia	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Badan Kepegawaian Daerah; 2.Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	880	Pemberhentian, meliputi : a. permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan II-IV b. Pensiun (janda/duda, yatim piatu) c. karena meninggal	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1.Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah; 2.Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	880	d. alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah
	880	e. tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Badan Kepegawaian Daerah



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	880	f. pembekalan pns yang akan purna dan tali asih	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	880	g. pemberhentian pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tidak tetap/Badan Layanan Umum Daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha) : a. perencanaan programpelatihan; b. sarana Pendidikan; c. jenis diklat dan Pelaporan diklat; d. pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (izin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali); f. tenaga pengajar/narasumber; g. jurnalllmiah; h. penelitian; i. magang; j. short course/ in house training; dan k. evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu : a. sertifikasi Kompetensi; b. pengembanganPerangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengajar; c. pengendalian Mutu Diklat; d. kerjasama Penyelenggaraan Diklat;	Biasa/ Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>e. karya Tulis/ Lokakarya;  f. kurikulum, Silabi dan Modul; dan  g. metode Pembelajaran (kuliah, Ceramah, Simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis).  Pengembangan KompetensiTeknis :  a. pengembangan Kompetensi /Diklat Teknis Umum;  b. pengembanganKompetensi /Teknis Inti;  c. pengembangan Kompetensi/ Teknis Pilihan; dan  d. praktek Lapangan/Observasi Lapangan.  Pengembangan KompetensiJabatan Fungsional :  a. pengembangan Kompetensi /Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional;  b. pengembanganKompetensi / Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional;  c. pengembangan Kompetensi/ Diklat Teknis Jabatan Fungsional; dan  d. praktek Lapangan/Observasi Lapangan.  Pengembangan KompetensiManagerial :  a. pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;  b. pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanPemerintah Daerah;  c. pendidikan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ;  d. visitasi/Benchmarking; dan</p>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e. inovasi Kepemimpinan.				
<b>III. KEUANGAN</b>						
	900	<p>Keuangan meliputi</p> <p>a. nota Keuangan;</p> <p>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan</p> <p>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Anggaran, meliputi :</p> <p>a. keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>b. Dokumen Perencanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPAL-Perangkat Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;</p> <p>c. anggaran kas; dan</p> <p>d. surat penyediaan dana (SPD).</p>	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.</p>
	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar pengujian SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan Dan Pengelolaan Kas pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	950	Pengelolaan kas daerah meliputi a. laporan pemotongan Iuran Wajib Pegawai, tabungan perumahan, pajak penghasilan dari gaji; b. laporan rekapitulasi penerimaan daerah; c. daftar pemotongan dan penyetoran pajak (pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan) dari CV/PT/instansi; d. surat tanda setoran (STS); e. laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran; f. rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank;	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha di masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		g. laporan mutasi penempatan deposito h. surat perintah transfer uang				
	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bidang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah.
	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Reklame	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan,telekomunikasi, parkir dan lain-lain) Retribusi penggunaan air bawah tanah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Retribusi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	970	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dan lain-lain) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Retribusi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.
	970	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Pajak Retribusi Bunga Deposito Bunga Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR) Sumbangan Pihak Ke Tiga (Kendaraan (Dealer),Kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving Kerjasama Dengan BUMIDA	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penerimaan DUKS				
	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengolahan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah.

#### B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBTANTIF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. PEMERINTAHAN						
	120	PEMERINTAH KABUPATEN Monografi, Tambahkan Kode Wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	120	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (LKPj) Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasama Antar Daerah Dan Luar Negeri Bupati, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Dan Sebangainya Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan Dan Sebangainya Sekertaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-Badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah
	120	Penyerahan Urusan/SPM				Dispermades PPKB
	120	Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan. Penyerahan Urusan				Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah
	120	Pembentukan / Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	120	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	120	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	120	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	130	Wilayah Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	140	PEMERINTAH DESA APBDes/Kel Permasalahan Batas Desa/Kelurahan Penghapusan Desa/Kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Desa pada Dispermades PPKB;
	160	DPRD a. pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD
	160	b. pemberhentian antar waktu, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan; c. alat kelengkapan dewan (pimpinan badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain/pansus); d. persidangan (rapat-rapat : paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, PANSUS, komisi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, pandangan umum, fraksi); e. fraksi (tata tertib, kode etik);	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. reses, peninjauan/kunjungan lapangan, kunjungan kerja/study banding/konsultasi; g. Kesejahteraan, keuangan dan penghargaan; dan h. Hak				
	180	Perundangan tingkat Kabupaten meliputi perda, peraturan Bupati, Peraturan Bupati Perundangan Tingkat Desa Meliputi Peraturan Desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Perundangan Tingkat Desa Meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Perundangan Tingkat Kabupaten Meliputi Keputusan Bupati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	200	POLITIK Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Orde Baru Orde Reformasi				
	210	Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai /organisasi terlarang izin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai /organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai /organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	220	Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	220	Musyawaharah Daerah, Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	220	Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusandan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musyawarah Daerah Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusandan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musyawarah Daerah Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusandan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musyawarah Daerah Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusandan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musyawarah Daerah Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Kesbangpollinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Perangkat Daerah	
	270	PEMILU (Pemilihan Umum), PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Pencalonan Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS,Kendaraan,Surat Suara,Kotak Suara) Pemungutan Suara/Penghitungan Suara Hasil Pemilu Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan pemenang pilkada	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Kesbangpollinmas; 2. Dispermades PPKB
	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Kesbangpollinmas;



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pelanggaran Sengketa Panwaslu		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Perangkat Daerah	2. Dispermades PPKB
	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/Demonstrasi Senjata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
	330	Bahan Laporan : - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	330	Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan ideologi/faham lain - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi Terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	330	Bendel Rahasia Intelijen meliputi : Dokumen Faham Lain - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelejen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kesbangpollinmas
	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas Pembinaan dan Diklat Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pendidikan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan bagi anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP
	350	KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan Subversi/Penyeludupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP Inspektorat
		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
		Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dan lain-lain)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan, Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pusdalops Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana				
	390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-pokok pikiran DPRD dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	BPBD
	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermasdes PPKB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong-royong Swadaya gotong royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan kerja masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa Inventarisasi Data	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB
	410	Petunjuk/Pembinaan/Pekembangan Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perlombaan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya				
	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dan lain sebagainya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar teladan, pertukaran Pelajar)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	420	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Sarana Pendidikan (buku, perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium; Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran Guru ke Luar Negeri Sertifikasi Guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olah Raga Pendidikan (PPDA SD, Porseni dan lain-lain) Olah Raga Rekreasi /Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dan lain-lain)	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan kesehatan, kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perizinan untuk Tenaga Medis Standarisasi Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD
		Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD
	440	Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) Jamkesmas Jamkesda Jampersal Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat Obat Generik TBC Kusta Frambusia	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD Filaria Serangga				
	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA(Irama Mastcmik Akut) Hipertensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, Mammae, Hepar, Paru dan lainnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD
	440	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi Higiene sanitasi Tempat-tempat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		makanan minuman Saranaair minum Pestisida, insektisida Pencemaran Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid Higiene sanitasiCA. Mammae Higiene sanitasiCA. Hepar Higiene sanitasiCA. Paru Kejadian Khusus Dekopensatiokordosis (serangan jantung) Asma Psikosis PPOM Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi dan Pengawasan Makanan Kekurangan Makanan Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok endemik (GAKI) Keperawatan Komite Medik Rawat Inap Rawat Jalan RSUD, RSJ, RS Khusus Studi Banding Rumah Sakit Penunjang Medis Radiologi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	440	Gizi Mutu Rumah Sakit Akreditasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Promosi Layanan Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Medis Kegiatan Bakti Sosial Tenaga Medis TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia) Diklat Tenaga Kesehatan/Medis Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis Perlitan Kesehatan Perizinan berkaitan dengan Alat Kesehatan Pengobatan Alternatif Pijat Akupuntur	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD
	440	SPI (Satuan Pengawas Internal) ISO PSBH (Problem Solving for Better Hospital) Jamu dan herbal Dukun Lembaga penyedia layanan kesehatan PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kesehatan masyarakat meliputi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandudan lain sebagainya Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung				
	440	RSU, RSJ, RS Khusus Puskesmas dan Puskesmas Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu,dan lain sebagainya Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular langsung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD
	440	Perizinan untuk tenaga medis meliputi surat izin praktek dan surat izin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan RSUD



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	450	Bantuan dibidang keagamaan Infaq. Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan lain-lain) Sarana pendidikan meliputi buku,gedung sekolahdan lain-lain	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora
	450	Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dan lain-lain) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kristen Protestan, Katholik (Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dan lain-lain) Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta,Domine dan lain-lain) Mazhab, Organisasi Gerejani) Hindu, Budha dan Kong Hu Cu Peribadatan Rumah Ibadah(Pura, Candi, Vihara, Klenteng) Tokoh Agama, Rohaniawan Mazhab, Organisasi Agama	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Dindikpora

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/Eks Psikotik Rehabilitasi Sosial Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar(PGOT) Anak jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	Dinas Sosial PPPA
	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial : Karang taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	460	Korban kecelakaan, pengungsian, rehabilitasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	460	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dan lain-lain Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA Dispermsades PPKB

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dan lain sebagainya Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja Krematorium	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya ( Trafficking, hipnotis, dan lain-lain) Kesejahteraan Anak Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dindukcapil
	470	TRANSMIGRASI Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerjasama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dindukcapil 2. Dinas Tenaga Kerja PTMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi</p> <p>Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/ peta informasi pemukiman</p> <p>Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /social dan jaringan transportasi</p> <p>Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah</p> <p>Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi</p> <p>Tata ruang pemukiman transmigrasi</p> <p>Rancangan dan pemanfaatan areal tanah</p> <p>Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan</p> <p>Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan</p> <p>Pengerahan</p> <p>Pendaftaran dan seleksi calon transmigran</p> <p>Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran</p> <p>Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan</p> <p>Rancangan kapling TSM</p> <p>Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum</p> <p>Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah</p>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perizinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penempatan Transmigran Kesiapan lokasi dandaya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina Data transmigranyang meninggalkan lokasi di setiap UPT				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti Penampungan transmigrasi (transito), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calonpeserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan, Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan danstatus, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penyediaan sarana kesehatan dan KB				



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa Pendistribusian bantuan pangan Pembinaan rohani Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial Pelayanan pos di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan Penilaian transmigran teladan Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha				
	470	KELUARGA BERENCANA Alat Kontrasepsi Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Pos KB desa, Akseptor KB	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA
	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	480	MEDIA MASSA Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok Perekonomian dan Perbankan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bidang lainnya Layanan Informasi/Leaflet Masukan Analisis Bupati Televisi Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers. Pers Tour Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi Masyarakat, Lembaga Pemerintah Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan Training Fotografi, Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	480	Media Cetak meliputi perizinan hingga pencabutan izin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perizinan hingga pencabutan izin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau Isi Siaran Pengkajian Isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan Reklame Pameran	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	480	Pendirian Information Center Pembinaan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Bupati Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi/Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Fotografi Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom Lembaga Komunikasi Masyarakat Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	480	Pengelolaan website Pemerintah Daerah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	500	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	Promosi perdagangan Pekan raya Pameran Pelelangan, distribusi Pemasaran Sembako Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan program kerja Beras, Garam Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dan lain-lain Pemasaran Pertokoan, Kaki Lima, Kios, Pusat Perbelanjaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	Pasar Ekspor izin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Perizinan (HO, Gangguan, Reklame, dan lain-lain) Penerbitan SIUP Perpanjangan izin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar Pulau Kerjasama bahan baku Industri pemasaran Kontrak Tera dan Tera Ulang, Biaya tera, Cap tanda tera Takaran, Timbangan dan anak timbangan	Dialihkan ke Kabupaten			Dispermades PPKB Dinas Tenaga Kerja PMPTSP Disperindagkop UKM
	510	Kalibrasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dispermades PPKB Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	510	Perdagangan antar daerah Aneka Usaha Perdagangan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	Impor izin Impor Pemberian izin Pengendalian izin				Dispermades PPKB Dinas Tenaga Kerja PMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Standart Mata Dagang Impor Rumah Tangga Management Perdagangan Internasional Kegiatan Import Pembinaan Import Pengendalian Import Pemantauan Import Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Import Penyaluran Kegiatan Import Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero) Perusahaan Daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri Promosi dan Informasi Kerjasama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	510	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUKM
	510	Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUKM
	510	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUKM
	510	Organisasi Koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran Koperasi Keragaman Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUKM



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyelesaian/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi				
	510	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUK M
	510	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUK M
	510	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUK M

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah				
	510	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	DisperindagkopUKM
	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas Termasuk Kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Tata Ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan Penyuluh Pengembangan SDM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Usaha Perikanan Penangkapan Ikan Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan				
	520	Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan izin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi Lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan Rencana zonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil Pemberian Rekomendasi, izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha perikanan Sarana Perikanan Rekomendasi izin Usaha Perikanan (Pembenihan/ Pembesaran) Fasilitas perizinan : SIUP, SIPI, SKP Perbenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Kepelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bimbingan Teknis Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran TPI/PPI Kesyahbandaran Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dan lain sebagainya	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam Terumbu karang Mangrove Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir	Biasa / Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan Hygieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Perkebunan Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan / Benih Produksi Rekomendasi izin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman Hama Pestisida Agensi Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi;Informasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementriaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	520	Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek dan Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar Bimtek dan Supervisi Pengawasan Keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek dan Supervisi Pangan Lokal Analisis dan Kajian Potensi Pangan Lokal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan
	520	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan pangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan/Minuman	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	530	Aneka Industri/Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Disperindagkop UKM
	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perizinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	540	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi baru terbarukan Perizinan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)				
	540	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah Cekungan Air Tanah(CAT):Pemetaan,Imbuhan,Lepasan Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsoran, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	540	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perizinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus izin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan izin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	550	PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	550	Trayek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
	550  550	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perizinan Laut Perkapalan Alat Angkutan Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-rambu Alur dan Kolam Pelabuhan Trayek Sarana/Kapal Kecelakaan Perhubungan Laut Pelabuhan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/Wisata Turis Pelayaran Khusus Pelabuhan Alur Layar Terminal Penumpang/kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal Kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pergerukan/Perawatan Alur Pelayaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum  Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah  Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Penjagaan Pantai dan Penganggulungan Keselamatan di Laut (GAMAT) Patroli Bandar Patroli Perairan Sertifikat Awak Kapal Kecelakaan, Gangguan Kecelakaan Penumpang/Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana/Prasarana Pembijakan/Penyelundupan Pencemaran Perizinan Berlayar/izin Pembangunan/izin Usaha				
	550	Perkereta-apian Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie Prasarana (Jalan/Jembatan) Angkutan Penumpang (perkereta-apian) Angkutan Barang (perkereta-apian) Keselamatan (perkereta-apian) Kecelakaan (perkereta-apian) Perawatan/Perbaikan Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Perhubungan Udara Lalu Lintas Angkutan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter/Non Reguler Penerbangan Khusus/Jembatan Udara Pelabuhan/Bandar Udara Tanah/Lokasi Bandara Landasan Apron Terminal Penumpang Terminal Cargo Perlengkapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Udara Pesawat Udara Dermaga Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri EMPU Sertifikasi Kelaikan Kelaikan Pesawat Udara Kelaikan Peralatan Penunjang Keselamatan Rambu-rambu Perakitan/Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Asuransi Asosiasi SATPAM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rally Udara/Lomba Perizinan Izin Terbang/Flight Approval Usaha KegiatanPenunjang Penerbangan/EMPU Pembukaan Kantor Cabang Rekomendasi Ketinggian Bangunan Pembangunan Bandar Udara Khusus				
	550	TeknologiInformasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	550	Sistem Pembinaan/Penertiban Perizinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata izin Pariwisata izin Usaha Pariwisata izin Usaha Jasa Pariwisata izin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata izin Usaha Sarana	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	550	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel T a r i f Travel Service Pramu Wisata Biro Perjalanan/Angkutan Wisata	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/Bangunan				
	550	Bina Usaha Insitusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	550	Metereologi dan Hidrologi Data Debit Andalan Curah Hujan Klimatologi Hujan Buatan Peneropongan Bintang	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja PTMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Permohonan Rekomendasi Passport Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW				
	560	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa /Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja PTMPTSP
	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker izin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerahdan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan izin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja PTMPTSP

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja PTMPTSP
	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial PPPA, Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
	580	PERBANKAN MONETER Kredit Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas Polis Premi Tertanggung/Pemegang Polis Uang Pertanggungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan pada Bagian Kredit Bank Jateng

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	600	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) Semen Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	600	Kayu Bahan penutup Atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya Instalansi Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahaya/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/explosive	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	610	PENGAIRAN Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	610	Kantung lumpur Silf ekstretor Escope chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	610	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup / terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	610	Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan samping Bangunan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan out let Bangunan terjun Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan Talang buang Syphon pembuangan Bangunan lainya Jalan Jalan Inspeksi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jempatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	610	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gorong-gorong Syphon Bangunan pembuangan Stasiun pompa pembuangan Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembuangan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Saluran Pintu Pembuangan Bangunan lainnya				
	610	Kolom pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok pengaman Talut Krib Kantung Lumpur Check Dam Syphon Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul Krib Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)				
	620	JALAN Jalan Kabupaten Daerah Penguasaan Tanah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	620	Bangunan Bangunan sementara Jalan Sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	620	Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Rel Pengamanan Pagar Turap Penahan Bronjong	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	620	Jalan Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (pavement) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM				
	620	Patok-patok ROW (sempadan) Rel pengamanan Pagar Turap penahan Bronjong Daerah penguasaan Badan jalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	620	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Pilon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	630	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	630	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok ROW(semipadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah				
	630	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas Patok pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
	640	BANGUNAN Gedung DPRD, Gedung Kantor Bupati, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD dan Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan,Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				
	640	Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban A t a p Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumusan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan Tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Aset Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi Tanah, Serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Fasilitasi administrasi Pertanahan Penetapan tanah ulayat lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Penyediaan Rumah Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah garapan lintas daerah Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Penyelesaian masalah tanah lintas daerah. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan bahan pengoordinasian. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Pemberian izin lokasi. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis / Konstruksi Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utylitas Umum Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpernghasilan Rendah. Pelaporan di bidang Perumahan Umum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan Swadaya. Pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya. Pengembangan Perumahan Swadaya. Fasilitasi dan Stimulan. Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	PERENCANAAN TEKNIK KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Penyiapan Bahan Pengoordinasian. Perencanaan Petunjuk Teknis. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utylitas Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITY KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Menyiapkan Bahan Pengoordinasian. Pengkajian Prasarana Sarana Utylitas. Penyusunan dan Pengembangan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengoordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pengkajian dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan teknis. Siapkan Bahan Pengoordinasian. Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Swadaya. Pemberdayaan dan Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	650	TATA RUANG Daerah perdagangan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan ( site dan servei ) Kepadatan Rendah ( low density ) Kepadatan Tinggi ( high density ) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah ( home industri ) Daerah Rekreasi ( open spece ) Publik Garden Sportdan playing fields Open space Transportasi ( tata letak ) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	650	Jaringan sungai Assineering Saluran Pengumpulan Instansi Pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut Konservasi Sumber Daya Alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan				
	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi Pengawasan Pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1 Inspektorat 2 Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintah Daerah Pengawasan Pemerintahan Desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dan lain-lain Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kebudayaan Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	750	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Pengawasan Pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Pengawasan Tata Lingkungan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum				Daerah
	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pengawasan Penilaian dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Parpol Penyimpangan pejabat/ Pegawai Negeri Sipil Persengketaan Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah
	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektorat 2. Sekretariat/ Bagian Umum/ Bagian Tata Usaha pada masing-masing Perangkat Daerah

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO